

## **BAB II**

### **DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA SERTA HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dinamika kebijakan luar negeri Republik Indonesia dan hubungan diplomatik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai sebuah pembahasan awal yang kemudian akan membantu penulis untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Perlu untuk memahami politik luar negeri Indonesia untuk memudahkan kita memahami berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait kebijakan luar negeri. Penulis juga akan memuat politik luar negeri di era Presiden Joko Widodo sebagaimana kebijakan menyederhanakan izin tenaga kerja asing merupakan kebijakan dari Presiden Joko Widodo.

#### **A. Dinamika Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

##### **1. Prinsip Bebas Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia**

Setiap negara pasti memiliki landasan dalam melaksanakan politik luar negerinya. Politik luar negeri setiap negara juga pasti memiliki arah dan tujuannya masing-masing. K.J. Holsti mendefinisikan politik luar negeri yaitu; *Foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated.*<sup>1</sup> Secara sederhana, politik luar negeri dirancang untuk mewujudkan kepentingan nasional dari suatu negara.

---

<sup>1</sup> K.J. Holsti. 1970. "National Role Conceptions in the study of Foreign policy". Vol. 14, No. 3. Hal. 233-309.

William D. Coplin mengidentifikasi terdapat 4 determinan politik luar negeri, yaitu; konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri.<sup>2</sup> Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestik suatu negara tidak berada pada ada arah yang jelas maka akan sulit untuk dilanjutkan dalam kontestasi politik internasional.

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13.

Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

*“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.*

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

*”dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 11 UUD 1945 (amandemen) berbunyi: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”*

Indonesia memiliki prinsip dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Prinsip yang digunakan yaitu sebuah prinsip yang dikenal dengan prinsip bebas aktif. Penulis meyakini

---

<sup>2</sup> William D. Coplin. 1992. “Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis”. Bandung: Sinar Baru. hal 165

bahwa kita semua sudah mengenal prinsip tersebut, bahwa Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif sebagai landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri dan perumusan setiap kebijakan luar negeri. Walaupun masih terdapat kebijakan yang kadangkala berseberangan dengan prinsip bebas aktif.

Politik Luar Negeri Indonesia (PLNRI) bebas aktif merupakan sebuah landasan yang menjadi prinsip dalam melaksanakan interaksi hubungan internasional oleh Republik Indonesia. Prinsip bebas dan aktif dicetuskan oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1947 yaitu pada saat konferensi *Inter Asia Relations Conference* di India. Sjahrir memaknai Prinsip bebas aktif sebagai sikap yang akan ditunjukkan oleh Indonesia di dunia Internasional. Prinsip bebas aktif terbukti masih digunakan hingga saat ini.

Yang dimaksud dengan bebas yaitu sebuah kebebasan dalam bersikap. Indonesia pada saat itu dihadapkan dengan 2 blok besar yang menguasai dunia yaitu Blok barat dan blok timur. Blok barat dikenal dengan negara-negara liberal, dan blok timur dikenal dengan negara-negara sosialis. Indonesia tentu dipengaruhi oleh kedua blok tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dan masih dalam tahap membangun kesatuan dan nasionalisme harus memilih salah satu blok. Tetapi Sjahrir mengatakan bahwa Indonesia tidak akan memihak blok manapun. Indonesia akan berada di tengah-tengah, berdiri sendiri tanpa mengikuti pihak manapun. Itulah yang dimaknai sebagai bebas, yaitu kebebasan dalam menentukan nasib bangsa.

Sjahrir juga menjelaskan makna dari Aktif, yaitu bahwa Indonesia akan terlibat secara aktif dalam kontestasi politik Internasional. Sebagaimana kedua blok yang ada di dunia, maka Indonesia walaupun tidak terlibat dalam blok manapun harus tetap ikut serta dalam hubungan internasional. Indonesia harus aktif menciptakan perdamaian dunia, dan

hal tersebut dibuktikan dengan diamanatkan makna dari aktif dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Selain itu, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.<sup>3</sup> Ia dikenal dengan pidatonya yang berjudul “Mendayung Diantara 2 Karang”. Dalam pidato tersebut, Ia menjelaskan makna dari prinsip bebas aktif yang sampai saat ini masih menjadi dasar bagi PLNRI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negeri. Akan tetapi, Indonesia memiliki landasan yang jelas, diantaranya; Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan, serta Indonesia harus mengupayakan berbagai macam diplomasi untuk menyelesaikan sengketa dengan Belanda.

Dalam konferensi *Inter Asian Relations Conference* di New Delhi pada tahun 1947. Sutan Sjahrir menyerukan bahwa negara-negara Asia harus bersatu untuk menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian hanya bisa diciptakan dengan cara hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, jelas bahwa prinsip bebas aktif dalam PLNRI sudah menjadi kesepakatan para tokoh-nasional waktu itu. Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta merupakan 2 tokoh kunci yang memberikan pandangan dan menjadi awal dari lahirnya prinsip bebas aktif. Selanjutnya, berbagai kalangan baik itu akademisi, pemikir dan tokoh

---

<sup>3</sup> Reni Windiani. Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi . Jurnal Dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4894/4438> Diakses pada tanggal 23 Desember 2018, Pukul 00.36 WIB.

kemudian melanjutkan pemaknaan prinsip bebas aktif dengan pandangannya masing-masing.

Terdapat tiga tujuan utama yang terkandung dalam Politik Bebas Aktif tersebut, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan ekonomi, seperti yang tertera dalam rencana pembangunan lima tahun.
- 2) Menyediakan stabilitas internal dan regional demi terwujudnya pembangunan nasional yang kondusif.
- 3) Melindungi integritas wilayah kesatuan Indonesia dan keamanan masyarakat seluruh Indonesia.

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa prinsip bebas aktif mulai diterjemahkan oleh para cendekiawan Indonesia. Misalnya A.W Wijaya, Ia menjelaskan bahwa bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Sedangkan aktif artinya bahwa Indonesia harus giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Mochtar Kusumaatmaja turut merumuskan makna dari bebas aktif. Bebas yaitu bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Dan aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersifat aktif. Dengan demikian dapat

---

<sup>4</sup> Indonesia's Foreign Policy/The Principles Of The Foreign Policy, diakses melalui, <http://www.embassyofindonesia.org/foreign/foreignpolicy.htm> Diakses pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 19.30 WIB.

dipahami bahwa Indonesia sudah sejak lama menggunakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri. Hingga saat ini, Indonesia masih berpegang teguh pada prinsip tersebut.

## **2. Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Joko Widodo**

Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yaitu mulai tahun 2014, mengalami beberapa transformasi dalam setiap kebijakan luar negeri. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo tetap menggunakan prinsip bebas aktif dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka Indonesia memang sudah seharusnya selalu berlandaskan hukum yang berlaku dalam setiap kebijakan di setiap era pemerintahan.

Penulis melihat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki visi misi yang jelas dan nyata khususnya untuk memajukan dan membangun perekonomian Indonesia. Walaupun kecenderungan program Presiden Joko Widodo lebih banyak kedalam negeri, tetapi tidak dipungkiri bahwa Ia juga memiliki kebijakan luar negeri yang matang sejak Ia memimpin. Berbagai kegiatan internasional dihadiri langsung oleh Presiden, bahkan Ia begitu terkenal di dunia Internasional. Salah satu keberhasilan yang dicapai Indonesia yaitu terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Berbagai kebijakan luar negeri telah dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sesuai visi misi yang telah di utarakan sebelum menjadi Presiden. Adapun visi Presiden Joko Widodo khususnya mengenai arah politik luar negeri yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong. Visi tersebut mempertegas

makna “kebebasan” Indonesia dengan cara mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional.<sup>5</sup>

Dikutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, adapun misi Presiden Joko Widodo, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dikutip dari sebuah jurnal oleh Mangadar Situmorang bahwa terdapat tujuan dari kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, diantaranya: <sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mangadar Situmorang. Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi-JK. Jurnal dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.10 WIB.

<sup>6</sup> Visi misi Jokowi-JK “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, diunduh pada: [http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_JokowiJK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_JokowiJK.pdf) diakses pada Jumat, 22 Desember 2018, Pukul 16.30 WIB.

<sup>7</sup> Mangadar Situmorang. Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Kepemimpinan Jokowi-JK. Jurnal dalam <https://media.neliti.com/media/publications/98738-ID-orientasi-kebijakan-politik-luar-negeri.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.10 WIB.

- 1) Mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional
- 2) Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia
- 3) Memperluas mandala keterlibatan regional di Indo-Pasifik
- 4) Merumuskan politik luar negeri dengan peran serta dari masyarakat

Selanjutnya, terdapat empat prioritas dalam politik luar negeri Presiden Joko Widodo, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Perlindungan warga negara Indonesia
- 2) Perlindungan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan perekonomian negara
- 4) Mewujudkan keamanan nasional dengan meningkatkan pertahanan nasional

Selain itu, terdapat 4 agenda strategis terkait politik luar negeri Indonesia, diantaranya:<sup>9</sup>

- 1) Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik
- 2) Melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat, serta melakukan penataan infrastruktur diplomasi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pemaparan Power Point Duta Besar Darmansyah Djumala Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri pada Kamis, 8 Januari 2015 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). "Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Jokowi: Agenda dan Prioritas".

- 3) Mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selak, dan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia. Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, Indonesia harus memiliki jiwa Cakrawati Samudra.
- 4) Meningkatkan peran global Indonesia sebagai kekuatan middle power regional secara selektif.

Selain itu, Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo juga tentu melanjutkan amanat dari para pendahulu yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Joko Widodo sangat mendukung kemerdekaan dari Palestina, dan Ia membawa Indonesia untuk tetap tidak mengakui keberadaan Israel yang selama ini menjajah Palestina. Presiden Joko Widodo juga membawa Indonesia untuk terlibat aktif dalam berbagai organisasi Internasional. Misalnya ASEAN, *United Nations*, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, APEC, OKI, dan sebagainya. Indonesia semakin terlibat aktif dalam berbagai forum Internasional. Berbagai forum Internasional berhasil diadakan di Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo, misalnya Pertemuan Asia Afrika yang banyak dihadiri oleh tamu-tamu penting seperti Raja Salman dari Arab Saudi.

Presiden Joko Widodo membuktikan dirinya bahwa Ia bisa membawa Indonesia menjadi negara yang semakin di segani. Misalnya, dengan memerintah Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Selain itu, Indonesia juga sangat fokus terhadap pembangunan maritim. Sebagaimana nawacita Presiden Joko Widodo yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Cita-cita tersebut didukung dengan semakin aktifnya Indonesia dalam organisasi IORA yaitu dengan menjadi ketua sekaligus tuan rumah

konferensi IORA. Tentu hal ini semakin menguatkan politik Indonesia di kawasan khususnya dan di dunia Internasional pada umumnya.

Pada tahun 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah ASIAN GAMES, yang merupakan pesta olahraga terbesar di Benua Asia. Keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus membangun politik dalam negeri, tetapi juga begitu memperhatikan perkembangan dunia internasional dengan terus memajukan posisi tawar Indonesia di level global. Penulis menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Joko Widodo seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri yaitu memajukan perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo yakin bahwa dunia internasional mampu mendatangkan keuntungan yang besar apabila dimanfaatkan dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Presiden Joko Widodo sudah memiliki arah yang jelas dan dalam perumusannya telah melalui proses yang matang dan panjang. Presiden Joko Widodo yang dikenal fokus membangun dalam negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa Ia juga fokus membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia Internasional. Cita-cita Presiden Joko Widodo yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia merupakan bukti nyata bahwa Presiden Joko Widodo tidak melupakan Indonesia di mata internasional.

## **B. Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok**

Sejak dahulu Indonesia sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama China. Setiap pemerintahan di Indonesia memiliki perbedaan dalam kebijakan luar negeri khususnya dengan Republik Rakyat Tiongkok. Mulai dari Era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Tetapi, secara sederhana bahwa Indonesia dan Tiongkok telah lama menjalin hubungan diplomatik.

### **1. Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia dan Tiongkok**

Dikutip dari sebuah jurnal yang berjudul *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia China* oleh Nadia Rahmayanti bahwa terdapat sejarah yang panjang dibalik hubungan Indonesia dan Tiongkok termasuk adanya interaksi antara leluhur bangsa Indonesia dan bangsa Tiongkok dapat ditelusuri sejak abad sebelum masehi. Kedekatan hubungan kedua negara diketahui melalui kedatangan etnis Tiongkok di Indonesia pertama kalinya yang dapat dibuktikan pula dengan adanya peninggalan benda-benda bersejarah dari kerajaan-kerajaan kuno Indonesia di masa lampau dimana telah memiliki kaitan yang erat dengan etnis Tiongkok, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga, dan Majapahit.<sup>10</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kedekatan hubungan kedua negara mencapai fase yang nyata pada saat kedatangan muhibah Cheng Ho ke tanah air pada abad 14.<sup>11</sup> Hal ini tentu menjadi bukti bahwa antara Indonesia dan Tiongkok telah memiliki hubungan yang

---

<sup>10</sup> Zein, Abdul Baqir. 2000. "Etnis China Dalam Potret Pembauran di Indonesia". Jakarta: Prestasi Insan, hal. 121. Dalam Jurnal *Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia China*. Terdapat dalam [http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia\\_Tiongkok.pdf](http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia_Tiongkok.pdf) Diakses pada tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.59 WIB.

<sup>11</sup> Wurjantoro, Edhie. 1996. "Sejarah Nasional dan Umum 1". Jakarta: Depdikbud pada Fakta Interaksi Indonesia - India/ China Sejak Awal Masehi dalam [http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia\\_Tiongkok.pdf](http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia_Tiongkok.pdf) diakses pada tanggal 22 Desember 2018, Pukul 16.59 WIB.

sudah terjalin baik sejak lama. Walaupun pada perjalanannya tidak terlepas dari dinamika ataupun naik turun hubungan kedua negara.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Pada era modern, hubungan antara Indonesia dan China mencapai masa kedekatannya pasca kemerdekaan Indonesia. Begitu pula periode awal hubungan bilateral kedua negara terjadi pada rentang waktu tahun 1950-1967.<sup>12</sup> Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Tiongkok yang berpaham komunis. Indonesia secara resmi mengakui Tiongkok sebagai sebuah negara pada tanggal 15 Januari 1950. Dilanjutkan dengan pengiriman duta besar Indonesia untuk Tiongkok pada tahun 1953.

Penulis yakin kita semua pernah mendengar istilah poros Jakarta Peking Pyongyang. Bahwa di awal-awal Indonesia berdiri dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia telah melanggengkan hubungan diplomatik dengan China yang saat ini kita kenal dengan nama Tiongkok. Poros Jakarta Peking Pyongyang berdiri pada tahun 1960, dengan ditandatanganinya kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Tentu ini merupakan sebuah bukti bahwa Indonesia sejak lama sudah memberikan perhatian terhadap hubungannya dengan Tiongkok.

Terjadi masa dimana hubungan Indonesia dan Tiongkok menjadi renggang, yaitu ketika di Indonesia muncul pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G30SPKI, yang dicurigai melibatkan Tiongkok sebagai pendukung daripada PKI. Sehingga pada masa-masa tersebut, hubungan kedua negara menjadi renggang terlebih

---

<sup>12</sup> Sahid Gitosardjono, Sukamdani. 2006. "Hubungan Indonesia Tiongkok di Era Kebangkitan Asia". Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya China. Dalam [http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia\\_Tiongkok.pdf](http://gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia_Tiongkok.pdf) Diakses pada tanggal 22 Desember 2018, Pukul 17.05

ketika Presiden Soeharto begitu tegas memberantas peredaran PKI. Di Jakarta, terjadi kerusuhan dengan etnis China yang hingga memakan korban jiwa. Tidak hanya Indonesia, pergerakan PKI diantisipasi juga oleh Singapura sebagai sebuah negara kecil yang mayoritas China tetapi berpaham liberal.

Pada akhirnya, Indonesia dianggap merugi ketika tidak memanfaatkan Tiongkok sebagai negara mitra. Malaysia terlebih dahulu memanfaatkan peluang untuk melakukan berbagai macam kerjasama dengan Tiongkok, sehingga mereka berhasil melaksanakan berbagai pembangunan dan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Presiden Gus Dur, Indonesia kembali mendekati diri dengan Tiongkok, dengan memberikan hak yang sama kepada etnis China yang ada di Indonesia, sebagaimana warga negara pribumi pada umumnya.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Megawati, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok disebut sebagai sebuah hubungan yang stabil. Tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Baik Indonesia maupun Tiongkok sama-sama memaknai hubungan sebagai hubungan kerjasama untuk membangun perekonomian masing-masing. Walaupun, Indonesia dihadapi dengan dilema ketika harus merenggankan hubungan dagang dengan Taiwan yang selama ini masih dianggap sebagai musuh bagi Tiongkok. Apabila Indonesia ingin tetap menjalin hubungan baik dengan Tiongkok, maka konsekuensinya Indonesia harus menjaga diri dari hubungan dekat dengan Taiwan.

Pada masa Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami masa kedekatan yang harmonis dengan Tiongkok. Presiden Joko Widodo yang begitu dekat dengan Beijing tentu melihat keuntungan yang besar yang bisa didapatkan dari Tiongkok. Hal ini tidak terlepas

dari keinginan Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan Investasi dari Tiongkok yang akan digunakan untuk mencukupi anggaran pembangunan.

## **2. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok di Era Presiden Joko Widodo**

Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dimulai sejak tahun 2014, dikenal dengan masa-masa dekatnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini tidak terlepas dari peran aktor yaitu Presiden Joko Widodo yang lebih memfokuskan kerjasama dengan negara terdekat yaitu Tiongkok. Presiden Joko Widodo melihat begitu besarnya peluang kerjasama yang bisa dijalin dengan Tiongkok. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo melihat keuntungan yang besar apabila Indonesia bisa memanfaatkan Tiongkok sebagai mitra kerjasama.

Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai sebuah politik luar negeri yang khusus. Mengingat, Politik luar negeri tersebut dikhususkan untuk Tiongkok dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dalam negeri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo begitu gencar melakukan berbagai macam pembangunan.

Kunjungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan mengunjungi Tiongkok pada hari Jumat 2 September 2014. Hal ini merupakan bukti bahwa Presiden Joko Widodo menempatkan Tiongkok sebagai fokus dari hubungan luar negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo memiliki berbagai macam kepentingan dalam hubungan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok, salah satunya yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dikutip dari sebuah skripsi dalam Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa terdapat tiga fokus kerjasama yang ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, diantaranya:<sup>13</sup>

- 1) Upaya peningkatan perdagangan terutama dengan mempersempit Gap Defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok
- 2) Peningkatan investasi kedua negara terutama dalam bidang manufaktur serta di dalam bidang infrastruktur
- 3) Peningkatan kunjungan wisatawan asing bahwa Tiongkok akan mendorong masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia

### **3. Kerjasama Indonesia dan Tiongkok**

Terciptanya kerjasama antar Indonesia dan Tiongkok dapat ditemukan pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, Indonesia dan Tiongkok mengalami masa tersulit dalam hubungan kedua negara. Indonesia menjauhkan diri dari Tiongkok dengan munculnya prasangka bahwa Tiongkok membantu gerakan Komunis di Indonesia. Barulah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia dan Tiongkok mengalami masa istimewa karena kedua negara berhasil memperbaiki hubungan diplomatiknya.

Kerjasama tidak hanya berbentuk perjanjian semata, terdapat realisasi dari perjanjian tersebut. Kerjasama juga tidak hanya berkaitan dengan perdagangan atau

---

<sup>13</sup> Dikutip dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17371/7%29%20PDF%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 18.05

ekonomi, tetapi dapat berbentuk kerjasama politik, budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, dll. Kedua negara yang sama-sama membuka Kantor Konsulat Jenderal juga merupakan bentuk daripada kerjasama. Di Tiongkok, Indonesia tidak hanya memiliki Kedutaan Besar sebagai wakil diplomatik, tetapi terdapat pula Konsulat Jenderal yang mengurus skema perdagangan, perlindungan warga negara Indonesia, dan lain sebagainya.

Berikut beberapa kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok yang berhasil penulis dapatkan dari berbagai sumber salah satunya yaitu dari Jurnal yang berjudul *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia China* oleh Nadia Rahmayanti.

**Tabel 1.1 Kerjasama Indonesia dan Tiongkok Pasca Orde Baru<sup>14</sup>**

No	Bentuk Perjanjian dan Kerjasama	Tempat dan Waktu
1	MOU mengenai Kerja sama Bidang Kesehatan dan Kesepakatan Kerjasama Bidang Kesehatan	Beijing, 23- 02-2000
2	Pertemuan dan penandatanganan oleh Komisi Gabungan Pertama tentang Kerjasama Pertanian	Beijing, 18- 09-2000
3	MOU mengenai Kerjasama Penangkapan Ikan	Beijing, 23- 04-2001
4	MOU mengenai Kerja Sama Pertanian	Jakarta, 7- 11-2001
5	Kesepakatan Penghindaran Pajak Ganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal demi Pajak atas Pendapatan	Jakarta, 7- 11-2001
6	MOU sehubungan dengan Penguatan Kerja Sama dan Pertukaran Informasi antara Bank Indonesia dan <i>People's Bank of China</i> (Bank Sentral Cina)	Jakarta, 7- 11-2001

<sup>14</sup> Dikumpulkan dari berbagai sumber, salah satunya dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id) Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 21.30 WIB.

7	Persiapan bagi Rencana Implementasi Pelancongan Warga Cina ke Indonesia	Jakarta, 7- 11-2001
8	Kesepakatan Dua Pihak mengenai "Pemanfaatan Sebagian Kawasan Penangkapan Ikan yang Dbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia"	Beijing, 19- 12-2001
9	MOU mengenai Bantuan Hibah dalam Kaitan dengan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik	Beijing, 24- 03-2002
10	MOU mengenai Pendirian Forum Energi	Beijing, 24- 03-2002
11	MOU mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Bidang Jembatan, Jalan Raya, dan Proyek Infrastruktur Lain	Beijing, 24- 03-2002
12	MOU mengenai Ikatan Jasa Penerbangan	Beijing, 25- 06-2002
13	Memorandum Bersama mengenai Forum Energi Indonesia dan Cina Pertama	Jakarta, 26- 09-2002
14	MOU mengenai Kerja Sama Memerangi Perdagangan Ilegal Hasil Hutan	Beijing, 18- 12-2002
15	Kepala negara ASEAN dan Cina menandatangani kerangka persetujuan Comprehensive Economic Cooperation (CEC)	Phonm Pehn, 4 November 2002
16	Menteri Ekonomi ASEAN dan Cina menandatangani protokol perubahan kerangka persetujuan	Bali, 6 Oktober 2003
17	Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok sebagai upaya Peningkatan Kerjasama Ekonomi	Beijing, 2014
18	Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok sebagai upaya Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tiongkok ke Indonesia	Beijing, 2014

Kerjasama Indonesia dan China dalam bidang ekonomi juga tidak luput dari perhatian kedua negara. Salah satu kerjasama Indonesia terhadap China pada bidang ekonomi yakni tergabungnya Indonesia di dalam ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) yang terjalin sehubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Kerjasama tersebut merupakan skema kerjasama perdagangan bebas yang membawa Indonesia khususnya dapat melakukan perdagangan dengan tarif yang murah menuju Tiongkok, begitupun sebaliknya.